



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024**

Jalan Pasar Tambunan No. 02 Balige Telp. (0632) 21001

2023



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

## BAB III SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah :
  - Bab I Pendahuluan;
  - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
  - Bab V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan

- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V  
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
1. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  2. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup :
1. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  2. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
1. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  2. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI  
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas-Dinas :
  - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - d. Dinas Sosial;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pertanian;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Kecamatan :
  - a. Kecamatan Tampahan;
  - b. Kecamatan Balige;
  - c. Kecamatan Laguboti;
  - d. Kecamatan Sigumpar;
  - e. Kecamatan Silaen;
  - f. Kecamatan Siantar Narumonda;
  - g. Kecamatan Porsea;
  - h. Kecamatan Uluan;
  - i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
  - j. Kecamatan Parmaksian;
  - k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
  - l. Kecamatan Lumban Julu;
  - m. Kecamatan Ajibata;
  - n. Kecamatan Habinsaran;
  - o. Kecamatan Borbor;
  - p. Kecamatan Nassau.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 5 Juli 2023  
BUPATI TOBA

Cap/Dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal 5 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

AUGUS SITORUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA

Cap/Dto

ANTHONY SIANIPAR, SH  
PEMBINA  
NIP. 19671217 200604 1 002

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024.

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige,

2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN TOBA



dr. JULIWAN HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197107012001121001

# DAFTAR ISI

*Halaman*

|  |      |
|--|------|
| KATA PENGANTAR .....   | i-ii |
| DAFTAR ISI .....   | iii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1    |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 2    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 5    |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 5    |
| <br>   |      |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN LALU .....                             | 7    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 7    |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 9    |
| 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah .....                         | 36   |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....  | 38   |
| 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....   | 39   |
| <br>   |      |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....  | 45   |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....  | 45   |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....   | 49   |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....  | 50   |
| <br>   |      |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....  | 54   |
| <br>   |      |
| BAB VI PENUTUP .....   | 55   |

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toba dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba merupakan rencana kerja awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Toba Tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba juga diselaraskan dengan rancangan Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024, serta Rencana Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2024 yang merupakan sumber usulan secara *top down*. Oleh karena itu, secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 mengintegrasikan program-program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui Rencana Kerja, setiap SKPD akan mampu merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dengan matang.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Toba yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR” seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Inilah yang menjadi arah / tujuan pembangunan Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2026 yang dinyatakan dengan Misi, tujuan dan sasaran seperti dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tersebut.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 ) ;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
  12. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496 ) ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 ) ;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12 ) ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Toba Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 ;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :
  - 1) Sebagai acuan dan gambaran tentang pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam bentuk susunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
  - 2) Sebagai alat ukur Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024.
- b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :
  - 1) Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024.

- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Tahun 2024.
- 3) Untuk menjabarkan visi dan misi Kabupaten Toba 2021 – 2026 dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.
- 4) Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan (Outline) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I       PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II       HASIL   EVALUASI   RENJA   DINAS   PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

|         |  |
|---------|--|
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA            |
|         | 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  |
|         | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|         | 3.4. Program dan Kegiatan  |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |
| BAB V   | PENUTUP  |

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba harus mengacu pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba setiap tahun.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba kedepannya setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 diharapkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat bekerja maksimal karena sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba tersebut dapat dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang juga merupakan turunan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2021 – 2026 **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”**.

Jika dievaluasi, Pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tahun 2023 seperti telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 masih belum sempurna karena adanya sasaran dan indikator kinerja seperti yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dengan Bupati Toba tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Toba dan adanya pembatasan refocusing anggaran.

Untuk mencapai target kinerja seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut diperlukan program dan kegiatan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2016 – 2021. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 berjalan sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 seperti berikut :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Toba**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| KODE         | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)  | Satuan Indikator          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 |                | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021 |    | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023 |               |                             |               |                       |      | Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2024 |               | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan   |               |  |      |
|--------------|--|--|---------------------------|--|----------------|---|----|---|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------|---|---------------|--|---------------|--|------|
|              |  |  |                           |  |                |   |    | Target Renja Tahun 2023   |               | Realisasi Renja Tahun 2023  |               | Tingkat Realisasi (%) |      |   |               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024 (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |      |
|              |  |  |                           |  |                |   |    | K   | Rp            | K                           | Rp            | K                     | Rp   |   |               | K  | Rp            | K  | Rp   |
| 1            | 2  | 3  | 4                         | 5  |                | 6   |    | 7   |               | 8                           |               | 9 = (8/7)             |      | 10  |               | 11 = (6+8+10)  |               | 12 = (11/5)                                  |      |
| 2            | Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar  |  |                           | K  | Rp             | K   | Rp | K   | Rp            | K                           | Rp            | K                     | Rp   | K   | Rp            | K  | Rp            | K  | Rp   |
| 2.14         | Urusan pemerintahan bidang penendalian penduduk dan keluarga berencana   |  |                           |  |                |   |    |   |               |                             |               |                       |      |   |               |  |               |  |      |
| 2.14.01      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | CAKUPAN PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH   | persen                    | 100.00   | 3,851,348,369  |   |    | 100.00  | 2,955,623,447 | 100.00                      | 2,726,558,912 | 100%                  | 92%  | 100.00  | 3,621,410,910 | 200  | 6,347,969,822 | 200%   | 165% |
| 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  | persen                    | 95.00  | 52,874,522     |   |    | 87.00   | 43,500,000    | 87.00                       | 31,532,000    | 100%                  | 72%  | 8.00  | 45,675,000    | 95   | 77,207,000    | 100%   | 146% |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN   | persen                    | 100.00   | 2,810,530,711  |   |    | 100.00  | 2,290,000,000 | 100.00                      | 2,078,632,412 | 100%                  | 91%  | 100.00  | 2,404,500,000 | 200  | 4,483,132,412 | 200%   | 160% |
| 2.14.01.2.05 | Adminstrasi Kepegawaian perangkat daerah   | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi   | persen                    | 97.67  | 95,500,000     |   |    | 83.72   | -             | -                           | -             | 0%                    | 0%   | 88.37   | 143,079,600   | 88   | 143,079,600   | 90%  | 150% |
| 2.14.01.2.06 | Adminstrasi umum perangkat daerah  | Frekuensi pelayanan administrasi kantor  | Bulan                     | 12.00  | 378,448,897    |   |    | 12.00   | 282,134,730   | 12.00                       | 230,474,585   | 100%                  | 82%  | 12.00   | 326,191,455   | 24   | 556,666,040   | 200%   | 147% |
| 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Terpeliharanya Barang Milik Daerah   | Bulan                     | 12.00  | 107,000,000    |   |    | -   | -             | -                           | -             | 0%                    | 0%   | 12.00   | 350,000,000   | 12   | 350,000,000   | 100%   | 327% |
| 2.14.01.2.08 | Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | Frekuensi penyediaan jasa penunjang  | bulan                     | 12.00  | 202,584,536    |   |    | 12.00   | 171,388,717   | 12.00                       | 184,064,610   | 100%                  | 107% | 12.00   | 175,011,855   | 24   | 359,076,465   | 200%   | 177% |
| 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  | Persentase pemeliharaan barang milik daerah  | persen                    | 100.00   | 204,409,703    |   |    | 100.00  | 168,600,000   | 100.00                      | 201,855,305   | 100%                  | 120% | 100.00  | 176,953,000   | 200  | 378,808,305   | 200%   | 185% |
| 2.14.02      | Program Pengendalian Penduduk  | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.  | Rata-rata Anak per Wanita | 3.55   | 1,365,638,875  |   |    | 3.59  | 370,000,000   | 3.59                        | 55,558,420    | 100%                  | 15%  | 3.58  | 231,000,000   | 7  | 286,558,420   | 202%   | 21%  |
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                               | Persen                    | 29.00  | 54,697,781     |   |    | 25.00   | 195,000,000   | 25.00                       | -             | 100%                  | 0%   | 26.00   | 47,250,000    | 51   | 47,250,000    | 176%   | 86%  |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa  | persen                    | 100.00   | 212,713,594    |   |    | 100.00  | 175,000,000   | 100.00                      | 55,558,420    | 100%                  | 32%  | 100.00  | 183,750,000   | 200  | 239,308,420   | 200%   | 113% |
| 2.14.03      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  | Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)   | persen                    | 100.00   | 13,096,744,843 |   |    | 12.10   | 2,681,404,598 | 12.10                       | 2,676,362,000 | 100%                  | 100% | 11.90   | 2,335,000,000 | 24   | 5,011,362,000 | 24%  | 38%  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                                 | Persentase penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmet need  | persen                    | 100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)  | 495,264,000    |   |    | 60 (16 Kec & 146 \Desa/Kel)   | 307,404,598   | 60 (16 Kec & 146 \Desa/Kel) | 92,699,191    | 0%                    | 30%  | 70(16 Kec &170 Desa/Kel)                                | 258,000,000   | 0  | 350,699,191   | #VALUE!                                      | 71%  |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | persen                    | 65.00  | 842,160,000    |   |    | 60.00   | 865,000,000   | 60.00                       | 1,690,512,150 | 100%                  | 195% | 61.00   | 520,000,000   | 121  | 2,210,512,150 | 186%   | 262% |

| KODE         | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)                                  | Satuan Indikator | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 |               | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023 |               |                            |               |                       |           | Target Program/Kegiatan Renja Tahun Berjalan Tahun 2024 |               | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan   |                |  |             |      |
|--------------|--|--|------------------|--|---------------|---|---|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------|---|---------------|--|----------------|--|-------------|------|
|              |  |  |                  |  |               |   | Target Renja Tahun 2023   |               | Realisasi Renja Tahun 2023 |               | Tingkat Realisasi (%) |           |   |               | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024 (tahun n-1) |                | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |             |      |
|              |  |  |                  |  |               |   | K   | Rp            | K                          | Rp            | K                     | Rp        |   |               | K  | Rp             | K  | Rp          | K    |
| 1            | 2  | 3  | 4                | 5  |               | 6   |   | 7             |                            | 8             |                       | 9 = (8/7) |   | 10            |  | 11 = (6+8+10)  |  | 12 = (11/5) |      |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | persen           | 85.00  | 1,395,782,245 |   |   | 60.00         | 1,025,000,000              | 60.00         | 512,360,089           | 100%      | 50%   | 70.00         | 1,255,000,000  | 130            | 1,767,360,089                                | 153%        | 127% |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB                        | MoU/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB  | MoU/PKS          | 10.00  | 180,000,000   |   |   | 5.00          | 484,000,000                | 5.00          | 380,790,570           | 100%      | 79%   | 5.00          | 302,000,000  | 10             | 682,790,570                                  | 100%        | 379% |
| 2.14.04      | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)   | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I   | persen           | 28.90  | 3,695,342,482 |   |   | 29.10         | 850,000,000                | 29.10         | 662,188,501           | 100%      | 78%   | 29.05         | 780,000,000  | 58             | 1,442,188,501                                | 201%        | 39%  |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga              | persen           | 21.00  | 620,755,000   |   |   | 13.00         | 700,000,000                | 13.00         | 662,188,501           | 100%      | 95%   | 15.00         | 615,000,000  | 28             | 1,277,188,501                                | 133%        | 206% |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri  | persen           | 68.00  | 94,000,000    |   |   | 60.00         | 150,000,000                | 60.00         | -                     | 100%      | 0%  | 62.00         | 165,000,000  | 122            | 165,000,000                                  | 179%        | 176% |
|              |  |  |                  | 22,009,074,569   |               |   |   | 6,857,028,045 |                            | 6,120,667,833 |                       |           |   | 6,967,410,910 |  | 13,088,078,743 |  |             |      |



## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mempunyai tugas untuk:

**“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

- a. penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB dan kader KB;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan KB;
- k. pembudayaan dan pengembangan KB, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
- l. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- n. pembinaan dan pendayagunaan kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba merumuskan kebijakan dan strategi, yang dijabarkan dalam penentuan program dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk tahun 2024, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel T-C.30. dalam lampiran.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan indikator, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

#### **I. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk rata-rata per tahun dalam jangka waktu tertentu dan berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, dengan penghitungan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

*Metode geometri*  
*r : Laju pertumbuhan penduduk*  
*P<sub>t</sub> : Jumlah penduduk tahun t*  
*P<sub>0</sub> : Jumlah penduduk tahun awal*  
*t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)*

Realisasi capaian realisasi laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Toba Samosir Tahun 2022

| No. | Sasaran                                 | Indikator Sasaran         | Tahun 2022 |               |             |
|-----|---|---------------------------|------------|---------------|-------------|
|     |   |                           | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1.  | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,61       | 0,50          | 122         |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKU adalah 0,50 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,61 persen maka capaiannya sebesar 122 persen, dengan demikian diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toba sudah melampaui target. Dengan demikian, maka tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang dan keluarga yang berkualitas belum tercapai.

**2. Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk**

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk sebagai berikut :

| INDIKATOR   | TARGET  | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |
|---|---------|-----------|--------------------|
| Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk | 29,00 % | 29,19 %   | 101,69%            |

Capaian Kinerja Indikator Persentase peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk Tahun 2022 ini adalah sebesar 29,19% dari target kinerja sebesar 29,00% sehingga persentase capaian adalah sebesar 101,69%. Realisasi ini diperoleh dari perhitungan PPKBD, Sub PPKBD, TPK, UPPKS, BKB, BKR, BKL, PIK R, PUS, PKB, Honorer, Pegawai dan dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022 dan dikali 100%.

### 3. (TFR) Total Fertility Rate

Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Realisasi capaian angka kelahiran total per WUS (25-49 tahun) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi  
TFR (Total Fertility Rate) Tahun 2022**

| <b>IKS</b>                 | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Total Fertility Rate (TFR) | 3,59          | 2,51             | 143              |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai untuk IKS adalah 2,51 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 3,59 maka capaiannya sebesar 143 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai TFR pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan remaja yang telah berhasil menurunkan ASFR 25-19 tahun dari 3,59/1000 kelahiran menjadi 2,51/1000 kelahiran dan meningkatkan median usia kawin pertama pada Tahun 2022 menjadi 26 tahun;
2. Peningkatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan fasilitas kesehatan melayani KB;
3. Meningkatkan upaya promosi dan KIE tentang isu kependudukan;

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi TFR sudah menunjukkan keberhasilan tahun 2022 mengalami kenaikan pencapaian di angka 2,51 persen dan 143 persen.

Perbaikan yang dilakukan untuk tahun 2022 agar target capaian TFR sebesar

143 bisa tercapai dengan melakukan strategi yang inklusif dengan memadukan kebijakan penurunan TFR yang bersinergi dengan OPD terkait. Strategi yang terintegrasi akan dilakukan melalui penguatan kesinambungan program dan kerangka pendanaan melalui APBD.

#### 4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) adalah persentase wanita yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Realisasi capaian Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Tahun 2022**

| IKS   | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--------|-----------|-----------|
| Cakupan yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> ) | 12,10  | 12,00     | 100,83    |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 12,00 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 12.10 maka capaiannya adalah sebesar 100,83 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan *unmeet need* pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah frekuensi gerak per tahun per Kecamatan sebanyak 3 kaligerak pelayanan KB di wilayah DTP;
2. Mendayagunakan PPKBD/Sub PPKBD dan Kelompk KB untuk melakukan penyuluhan KIE di setiap Posyandu yang difasilitasi melalui anggaran DAK Non Fisik.

Agar target penurunan *unmeet need* di tahun 2022 semakin meningkat perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi terutama penggarapan program KB dan reproduksi serta peningkatan penggarapan wilayah DTPK melalui pelayanan bergerak untuk menjangkau PUS yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan KB; mengadvokasi organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia untuk mendorong Bidan menjadi jejaring fasilitas kesehatan

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; peningkatan kapasitas PKB dan IMP dalam memberikan KIE KB serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi terkait KB kepada masyarakat; dan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan motivator KB Pria dalam mendukung program KB dan kesehatan reproduksi.

**5. Persentase Peserta KB Aktif**

Persentase Peserta KB Aktif cakupan peserta KB Aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Realisasi capaian Peserta KB Aktif untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Tahun 2022**

| <b>IKS</b>       | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Peserta KB Aktif | 77,45         | 77,83            | 100,49           |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 77,83 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 77,45 maka capaiannya adalah sebesar 100,49 persen.

**6. Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)**

Menurunkan angka kelahiran kelompok remaja atau dikenal dengan Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun itu cukup beralasan. Kehamilan remaja dan bayi tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayi. Akan tetapi akan memengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi  
Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn  
(ASFR 15-19 thn)  
Tahun 2022

| IKS   | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--------|-----------|-----------|
| Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn) | 0,29   | 0,096     | 302       |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 0,096 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,29 maka capaiannya adalah sebesar 302 persen.

## 7. Indeks Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga adalah indikator yang menunjukkan kondisi dinamik keluarga dalam mengelola masalah uang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkulaitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan Nasional. Realisasi capaian indikator Indeks Ketahanan Keluarga untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7 Perbandingan Target dan Realisasi  
Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2022**

| IKS                       | Target | Realisasi | % Capaian |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Indeks Ketahanan Keluarga | 0,64   | 0,48      | 75        |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 0,48 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,64 maka capaiannya adalah sebesar 75 persen.

**8. Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**

Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk mendukung target menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR), meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modren, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya layanan fasilitas kesehatan (Faskes). Realisasi capaian indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2022**

| <b>IKS</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 88,46         | 87,50            | 99               |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 87,50 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 88,46 maka capaiannya adalah sebesar 99 persen.

## 9. Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, pelatihan program dan pelayanan kontrasepsi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan terutama yang memberikan layanan KB merupakan cara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB.

Pencapaian kinerja untuk Indikator Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap adalah sebagai berikut :

### Perbandingan Target dan Realisasi

Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap **Tahun 2022**

| IKS  | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|--------|-----------|-----------|
| Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap | 18,90  | 18,50     | 97,88     |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 18,50 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 18,90 maka capaiannya adalah sebesar 97,88 persen.

## 10. Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan.

**Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi**  
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I **Tahun 2022**

| IKS                                    | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|--------|-----------|-----------|
| Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 29,10  | 39,33     | 74        |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 39,33 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 29,33 maka capaiannya adalah sebesar 74 persen.

### 11. Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB

Penyelenggaraan BKB merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina tumbuh kembang anak secara utuh dan optimal, melalui pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional dan spritual guna mencapai indikator program KB, kader-kader dari kelompok peserta KB untuk membantu mensosialisasikan program-program kelompok kegiatan khususnya kegiatan BKB. Kader Poktan adalah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta dan memiliki anggota keluarga usia balita.

**Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi**  
Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB Tahun 2022

| IKS   | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--------|-----------|-----------|
| Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB | 54,00  | 62,98     | 116,63    |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 62,98 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 54,00 maka capaiannya adalah sebesar 116,63 persen.

### 12. Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB

**Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi**  
Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB Tahun 2022

| IKS   | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|--------|-----------|-----------|
| Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB | 53,00  | 45,05     | 85        |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 45,05 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 53,00 maka capaiannya adalah sebesar 85 persen.

### 13. Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB

**Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi**  
 Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB Tahun 2022

| <b>IKS</b>                                      | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB | 42,00         | 28,8             | 68,57            |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 28,8 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 42,00 maka capaiannya adalah sebesar 68,57 persen.

### 14. Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri

**Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi**  
 Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri Tahun 2022

| <b>IKS</b>                                    | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri | 60,00         | 52,63            | 87,71            |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 60,00 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 52,63 maka capaiannya adalah sebesar 87,71persen.

## 15. Persentase Kelompok PIK R/M

**Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi**  
Persentase Kelompok PIK R/M Tahun 2022

| <b>IKS</b>                  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Persentase Kelompok PIK R/M | 55            | 7                | 13               |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 7 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 55 maka capaiannya adalah sebesar 13 persen.

## 16. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

**Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi**  
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2022

| <b>IKS</b>                   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>% Capaian</b> |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Rata-rata Usia Kawin Pertama | 24            | 26               | 108              |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi yang dicapai adalah 7 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 26 maka capaiannya adalah sebesar 108 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indeks ketahanan keluarga keluarga berencana pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Memberikan penyuluhan materi 8 (delapan) fungsi keluarga pada kegiatan sosialisasi pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL dan Kelompok UPPKS);
- Melakukan penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan menggandeng mitra kerja (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Komite AIDS, PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepala Desa, Koramil, Bidan Desa, Camat);
- Promosi tentang 8 (delapan) fungsi keluarga melalui media cetak dan elektronik (iklan radio) dan memanfaatkan momentum strategis seperti Hari Keluarga Nasional serta kegiatan lain yang melibatkan stakeholder dan mitra kerja;

- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan peran aktif stakeholder dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana;
- Meningkatkan kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Program Bangga Kencana melalui berbagai media;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- Meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap Program Bangga Kencana;
- Mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (KASIH), yang berlokasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. PPKS KASIH tersebut disediakan untuk masyarakat secara terbuka, dengan tujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mengenal Program KB secara menyeluruh. Fasilitas yang disediakan PPKS KASIH adalah:
  - (1) Data dan Informasi Program KB;
  - (2) Layanan Konsultasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  - (3) Klinik Pelayanan KB;
  - (4) Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL);
  - (5) Stand produk unggulan Kelompok UPPKS;

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program/kegiatan yang paling menunjukkan output paling mendukung dalam pencapaian kinerja organisasi adalah “Program Keluarga Berencana”, dimana program tersebut merupakan mampu memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat dalam penggerakan Program Bangga Kencana.

Namun perlu juga dipahami, bahwa sasaran dari setiap program/kegiatan yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan sebuah sistem, dimana antara program/kegiatan yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Terjadinya keberhasilan salah satu sasaran, akan mempengaruhi keberhasilan sasaran yang lain. Sebaliknya, jika terjadinya kegagalan salah satu sasaran akan berdampak pada kegagalan dari sasaran yang lain. Keberhasilan dari rangkaian sistem yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, nantinya secara menyeluruh akan bermuara pada keberhasilan dalam mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, khususnya di Kabupaten Toba.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah birokrasi:
  - a. Koordinasi antar lembaga masih lemah;
  - b. Tupoksi dengan beberapa perangkat daerah *over lapping*/tumpang tindih.

2. Masalah Manajemen KB dan Kualitas Pelayanan KB;
  - a. Tidak digantinya tenaga Penyuluh KB yang pensiun, sehingga ratio PLKB/Desa adalah 1:9 (SPM = 1:2);
  - b. Tingginya *unmeet need* 2022 (12,00)
3. Masalah kebijakan dan tradisi:
  - a. Aspek kependudukan belum menjadi prioritas utama, sehingga sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah dalam bentuk Perda maupun Perbup tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Toba;
  - b. Tradisi adat Batak, dimana generasi penerus marga adalah laki-laki, sehingga keluarga yang belum mempunyai anak laki-laki akan terus melakukan reproduksi tanpa mempertimbangkan kesehatan reproduksi dan kemampuannya dalam pembangunan keluarga yang berkualitas.

Capaian kinerja atas pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

**TABEL T-C.30.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN TOBA**

| NO. | Indikator   | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra |               |               |               |               | Realisasi<br>Capaian | Proyeksi      | Catatan<br>Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
|     |   |                             |     | Tahun<br>2022  | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2023        | Tahun<br>2023 |                     |
| (1) | (2)   | (3)                         | (4) | (5)            | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)                 | (11)          | (13)                |
| 1   | Indeks Ketahanan Keluarga   | -                           | -   | 0.64           | 0.65          | 0.66          | 0.67          | 0.68          | 55%                  |               |                     |
| 2   | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk                             | -                           | -   | 29.00          | 31.00         | 33.00         | 35.00         | 37.00         | 2.80%                |               |                     |
| 3   | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)   | -                           | -   | 0.61           | 0.60          | 0.59          | 0.58          | 0.57          | 1,20%                |               |                     |
| 4   | TFR (Total Fertility Rate)  | -                           | -   | 3.59           | 3.58          | 3.57          | 3.56          | 3.55          | 2'52%                |               |                     |
| 5   | Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan | -                           | -   | 88.46          | 92.30         | 96.15         | 100.00        | 100.00        | 87.50%               |               |                     |
| 6   | Persentase Peserta KB Aktif   | -                           | -   | 77.45          | 77.50         | 77.55         | 77.60         | 77.65         | 77'83%               |               |                     |
| 7   | Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap                                  | -                           | -   | 18.90          | 18.95         | 19.00         | 19.05         | 19.10         | 18.34%               |               |                     |
| 8   | Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)                               | -                           | -   | 12.10          | 12.00         | 11.90         | 11.80         | 11.70         | 12,00%               |               |                     |
| 9   | Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)             | -                           | -   | 0.29           | 0.28          | 0.27          | 0.26          | 0.25          | 1                    |               |                     |
| 10  | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  | -                           | -   | 29.10          | 29.05         | 29.00         | 28.95         | 28.90         | 25%                  |               |                     |
| 11  | Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB   | -                           | -   | 54.00          | 55.00         | 56.00         | 57.00         | 58.00         | 62%                  |               |                     |
| 12  | Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB   | -                           | -   | 53.00          | 55.00         | 57.00         | 59.00         | 61.00         | 45%                  |               |                     |
| 13  | Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB   | -                           | -   | 42.00          | 44.00         | 46.00         | 48.00         | 50.00         | 28%                  |               |                     |
| 14  | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri   | -                           | -   | 60.00          | 62.00         | 64.00         | 66.00         | 68.00         | 52%                  |               |                     |

|    |                                     |   |   |     |     |     |     |     |     |  |  |
|----|-------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 15 | Persentase Kelompok PIK R/M         | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34% |  |  |
| 16 | Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita | - | - | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 26  |  |  |

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal disusun tentang rencana pencapaian target dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan bahan bacaan serta kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal penyelamatan atau pengamanan arsip penting daerah.

Rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah tertuang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan yang bersumber dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026. Namun hal itu masih perlu dianalisa agar penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dapat dihitung secara proporsional dan tepat sasaran sesuai dengan diharapkan.

Dalam rancangan awal disajikan tentang program dan kegiatan yang dapat mendukung target dan indikator kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2021 – 2026 dengan jumlah usulan dana sebesar Rp. 6.967.410.909,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dengan rincian 4 program, 15 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setelah direview rancangan awal seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan layak untuk diajukan. Berdasarkan hasil review tersebut diketahui bahwa Program yang diusulkan ada sebanyak 4 program dengan jumlah 15 kegiatan serta 46 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 7.090.419.153,00 (*tujuh miliar sembilan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) terlihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Toba**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No. | Rancangan Awal RKPD  |           |  |                            |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |           |  |                            |                     | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|----------------------------|---------------------|--|-----------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian             | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian             | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)                        | (6)                 | (7)  | (8)       | (9)  | (10)                       | (11)                | (12)            |
| I   | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>   | Kab. Toba | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun                                      | 3,57%                      | 203,962,500         | Program Pengendalian Penduduk  | Kab. Toba | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS   | 3,57%                      | 203,962,500         |                 |
|     | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>           | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 27,00%                     | 49,612,500          | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                  | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 27,00%                     | 49,612,500          |                 |
| 1   | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Kab. Toba | Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan  | 3 sekolah                  | 49,612,500          | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Kab. Toba | Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan  | 3 sekolah                  | 49,612,500          |                 |
|     | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kab. Toba | Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa  | 100%                       | 154,350,000         | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Kab. Toba | Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa  | 100%                       | 154,350,000         |                 |
| 2   | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Kab. Toba | Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana   | 1 dokumen                  | 82,687,500          | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga   | Kab. Toba | Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana   | 1 dokumen                  | 82,687,500          |                 |
| 3   | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Kab. Toba | Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB  | 1 dokumen                  | 22,050,000          | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Kab. Toba | Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB  | 1 dokumen                  | 22,050,000          |                 |
| 4   | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain  | Kab. Toba | Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB   | 32 unit                    | 49,612,500          | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain  | Kab. Toba | Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB   | 32 unit                    | 49,612,500          |                 |
| II  | <b>Program Keluarga Berencana</b>  | Kab. Toba | Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)   | 12.10%                     | 2,175,100,000       | Program Keluarga Berencana   | Kab. Toba | Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)   | 12.10%                     | 2,175,100,000       |                 |
|     | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>   | Kab. Toba | Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmeet need                 | 80 (16 Kec & 146 Desa/Kel) | 470,750,000         | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Kab. Toba | Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmeet need                 | 80 (16 Kec & 146 Desa/Kel) | 470,750,000         |                 |
| 5   | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK   | Kab. Toba | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana  | 16 unit                    | 50,000,000          | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK   | Kab. Toba | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana  | 16 unit                    | 50,000,000          |                 |
| 6   | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  | Kab. Toba | Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana  | 16 dokumen                 | 90,750,000          | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  | Kab. Toba | Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana  | 16 dokumen                 | 90,750,000          |                 |

| No. | Rancangan Awal RKPD  |           |   |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |           |   |                |                      | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|---|----------------|----------------------|--|-----------|---|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp)  | Program/Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)   | (5)            | (6)                  | (7)  | (8)       | (9)   | (10)           | (11)                 | (12)            |
| 7   | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK   | Kab. Toba | Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB   | 16 laporan     | 330,000,000          | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK   | Kab. Toba | Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB   | 16 laporan     | 330,000,000          |                 |
|     | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Kab. Toba | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b> | <b>62,00%</b>  | <b>1,189,350,000</b> | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Kab. Toba | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b> | <b>62,00%</b>  | <b>1,189,350,000</b> |                 |
| 8   | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB   | Kab. Toba | Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB   | 2 unit         | 300,000,000          | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB   | Kab. Toba | Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB   | 2 unit         | 300,000,000          |                 |
| 9   | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Toba | Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO   | 75 laporan     | 605,000,000          | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Toba | Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO   | 75 laporan     | 605,000,000          |                 |
| 10  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Kab. Toba | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan  | 100 orang      | 284,350,000          | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Kab. Toba | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /  | 100 orang      | 284,350,000          |                 |
|     | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kab. Toba | <b>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</b>   | <b>75,00%</b>  | <b>380,000,000</b>   | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kab. Toba | <b>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</b>   | <b>75,00%</b>  | <b>380,000,000</b>   |                 |
| 11  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          | Kab. Toba | Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes  | 1 laporan      | 60,000,000           | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          | Kab. Toba | Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes  | 1 laporan      | 60,000,000           |                 |
| 12  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 150 orang      | 100,000,000          | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 150 orang      | 100,000,000          |                 |
| 13  | Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB   | Kab. Toba | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB   | 8 unit         | 80,000,000           | Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB   | Kab. Toba | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB   | 8 unit         | 80,000,000           |                 |
| 14  | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif   | 50 orang       | 30,000,000           | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif   | 50 orang       | 30,000,000           |                 |
| 15  | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan  | Kab. Toba | PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi   | 750 orang      | 50,000,000           | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan  | Kab. Toba | PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi   | 750 orang      | 50,000,000           |                 |
| 16  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  | Kab. Toba | Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)   | 0 orang        | -                    | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  | Kab. Toba | Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)   | 0 orang        | -                    |                 |
| 17  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Kab. Toba | Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus   | 3 laporan      | 60,000,000           | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Kab. Toba | Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran  | 3 laporan      | 60,000,000           |                 |

| No. | Rancangan Awal RKPD  |           |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |           |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|----------------|---------------------|--|-----------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)            | (6)                 | (7)  | (8)       | (9)  | (10)           | (11)                | (12)            |
|     | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB  | Kab. Toba | Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB  | 5 MoU/PKS      | 135,000,000         | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB                                | Kab. Toba | Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB  | 5 MoU/PKS      | 135,000,000         |                 |
| 18  | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | Kab. Toba | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes) | 450 akseptor   | 90,000,000          | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | Kab. Toba | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-Kes) | 450 akseptor   | 90,000,000          |                 |
| 19  | Pembinaan Terpadu Kampung KB   | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB  | 55 persen      | 45,000,000          | Pembinaan Terpadu Kampung KB   | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB                                    | 55 persen      | 45,000,000          |                 |
| III | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  | Kab. Toba | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I   | 29%            | 360,000,000         | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  | Kab. Toba | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I   | 29%            | 360,000,000         |                 |
|     | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Kab. Toba | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  | 15,00 persen   | 310,000,000         | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Kab. Toba | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  | 15,00 persen   | 310,000,000         |                 |
| 20  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Kab. Toba | Sarana dan Prasarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan   | 10 unit        | 60,000,000          | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Kab. Toba | Sarana dan Prasarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan   | 10 unit        | 60,000,000          |                 |
| 21  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Kab. Toba | Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilatih dan diorientasi              | 150 orang      | 90,000,000          | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                  | Kab. Toba | Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilatih dan diorientasi  | 150 orang      | 90,000,000          |                 |
| 22  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Kab. Toba | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi  | 1 laporan      | 80,000,000          | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                   | Kab. Toba | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi                                | 1 laporan      | 80,000,000          |                 |
| 23  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Kab. Toba | Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan   | 1 laporan      | 80,000,000          | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Kab. Toba | Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan   | 1 laporan      | 80,000,000          |                 |
|     | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat  | Kab. Toba | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri  | 20,00 persen   | 50,000,000          | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat  | Kab. Toba | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri  | 20,00 persen   | 50,000,000          |                 |
| 24  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Toba | kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga   | 6 organisasi   | 50,000,000          | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | Kab. Toba | kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga   | 6 organisasi   | 50,000,000          |                 |

| No. | Rancangan Awal RKPD   |           |  |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan  |           |  |                |                     | Catatan Penting |
|-----|---|-----------|--|----------------|---------------------|---|-----------|--|----------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1) | (2)   | (3)       | (4)  | (5)            | (6)                 | (7)   | (8)       | (9)  | (10)           | (11)                | (12)            |
| IV  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kab. Toba | Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah                   | 100%           | 3,521,000,000       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kab. Toba | Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah                   | 100%           | 3,521,000,000       |                 |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab. Toba | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah                  | 8%             | 40,000,000          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab. Toba | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah                  | 8%             | 40,000,000          |                 |
| 25  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | DPPKB     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 8 dokumen      | 30,000,000          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | DPPKB     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 8 dokumen      | 30,000,000          |                 |
| 26  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPPKB     | Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja                        | 7 laporan      | 10,000,000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPPKB     | Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja                        | 7 laporan      | 10,000,000          |                 |
|     | Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Kab. Toba | Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN                 | 100%           | 2,505,000,000       | Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Kab. Toba | Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN                 | 100%           | 2,505,000,000       |                 |
| 27  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | DPPKB     | Gaji dan Tunjangan PNS                                       | 30 orang/bulan | 2,500,000,000       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | DPPKB     | Gaji dan Tunjangan PNS                                       | 30 orang/bulan | 2,500,000,000       |                 |
| 28  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | DPPKB     | Laporan keuangan akhir tahun                                 | 1 laporan      | 5,000,000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | DPPKB     | Laporan keuangan akhir tahun                                 | 1 laporan      | 5,000,000           |                 |
|     | Adminstrasi Kepegawaian   | Kab. Toba | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi             | 88,37%         | 80,000,000          | Adminstrasi Kepegawaian   | Kab. Toba | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi             | 88,37%         | 80,000,000          |                 |
| 29  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | DPPKB     | Pengadaan pakaian dinas                                      | 0 unit         | -                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | DPPKB     | Pengadaan pakaian dinas                                      | 0 unit         | -                   |                 |
| 30  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | DPPKB     | pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan        | 6 orang        | 80,000,000          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | DPPKB     | pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan        | 6 orang        | 80,000,000          |                 |
|     | Adminstrasi umum perangkat daerah   | Kab. Toba | Frekuensi pelayanan administrasi kantor                      | 1 paket        | 335,000,000         | Adminstrasi umum perangkat daerah   | Kab. Toba | Frekuensi pelayanan administrasi kantor                      | 1 paket        | 335,000,000         |                 |
| 31  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | DPPKB     | Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 1 paket        | 3,000,000           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | DPPKB     | Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan             | 1 paket        | 3,000,000           |                 |
| 32  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | DPPKB     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                 | 1 paket        | 90,000,000          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | DPPKB     | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                 | 1 paket        | 90,000,000          |                 |
| 33  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | DPPKB     | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih               | 1 paket        | -                   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | DPPKB     | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih               | 1 paket        | -                   |                 |
| 34  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | DPPKB     | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Bulanan      | 1 paket        | 30,000,000          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | DPPKB     | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Bulanan      | 1 paket        | 30,000,000          |                 |
| 35  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | DPPKB     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | 1 paket        | 10,000,000          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | DPPKB     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | 1 paket        | 10,000,000          |                 |
| 36  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | DPPKB     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan                | 1 dokumen      | 2,000,000           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | DPPKB     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan                | 1 dokumen      | 2,000,000           |                 |
| 37  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | DPPKB     | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 1 laporan      | 200,000,000         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | DPPKB     | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 1 laporan      | 200,000,000         |                 |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Kab. Toba | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                           | 12 bulan       | 140,000,000         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Kab. Toba | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                           | 12 bulan       | 140,000,000         |                 |

| No.                | Rancangan Awal RKPD  |                  |  |                 |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |                  |  |                 |                     | Catatan Penting      |
|--------------------|--|------------------|--|-----------------|----------------------|--|------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
|                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp)  | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Kebutuhan Dana (Rp) |                      |
| (1)                | (2)  | (3)              | (4)  | (5)             | (6)                  | (7)  | (8)              | (9)  | (10)            | (11)                | (12)                 |
| 38                 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | DPPKB            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan             | 0 unit          | -                    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | DPPKB            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan             | 0 unit          | -                   |                      |
| 39                 | Pengadaan Mebel  | DPPKB            | Pengadaan Mebel  | 0 jenis         | -                    | Pengadaan Mebel  | DPPKB            | Pengadaan Mebel  | 0 jenis         | -                   |                      |
| 40                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | DPPKB            | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                    | 1 unit          | 100,000,000          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | DPPKB            | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                    | 1 unit          | 100,000,000         |                      |
| 41                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | DPPKB            | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit          | 40,000,000           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | DPPKB            | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 unit          | 40,000,000          |                      |
|                    | <b>Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</b>               | <b>12 bulan</b> | <b>225,000,000</b>   | <b>Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</b>               | <b>12 bulan</b> | <b>225,000,000</b>  |                      |
| 42                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | DPPKB            | Pembayaran rekening listrik dan internet                 | 1 laporan       | 25,000,000           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | DPPKB            | Pembayaran rekening listrik dan internet                 | 1 laporan       | 25,000,000          |                      |
| 43                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | DPPKB            | Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD        | 1 laporan       | 200,000,000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | DPPKB            | Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD        | 1 laporan       | 200,000,000         |                      |
|                    | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                       | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>       | <b>100%</b>     | <b>196,000,000</b>   | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                       | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>       | <b>100%</b>     | <b>196,000,000</b>  |                      |
| 44                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPPKB            | Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun  | 52 unit         | 180,000,000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPPKB            | Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun  | 52 unit         | 180,000,000         |                      |
| 45                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | DPPKB            | Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara            | 10 unit         | 16,000,000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | DPPKB            | Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara            | 10 unit         | 16,000,000          |                      |
| <b>J U M L A H</b> |  |                  |  |                 | <b>6,260,062,500</b> | <b>J U M L A H</b>   |                  |  |                 |                     | <b>6,260,062,500</b> |

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Toba**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| No.       | Rancangan Awal RKPD  |                  |   |                                       |                       | Hasil Analisis Kebutuhan  |                  |   |                                       |                      | Catatan Penting |
|-----------|--|------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
|           | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja   | Target Capaian                        | Pagu Indikatorif (Rp) | Program/Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja   | Target Capaian                        | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| (1)       | (2)  | (3)              | (4)   | (5)                                   | (6)                   | (7)   | (8)              | (9)   | (10)                                  | (11)                 | (12)            |
| <b>I</b>  | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun</b>                                      | <b>3,57%</b>                          | <b>49,612,500</b>     | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS</b>   | <b>3,58%</b>                          | <b>231,000,000</b>   |                 |
|           | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>           | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk</b> | <b>26,00%</b>                         | <b>47,250,000</b>     | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk</b> | <b>26,00%</b>                         | <b>47,250,000</b>    |                 |
| 1         | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota   | DPPKB            | Dokumen GDPK 5 Pilar yang tersusun  | 1 dok                                 | -                     | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota  | DPPKB            | Dokumen GDPK 5 Pilar yang tersusun  | 1 dok                                 | -                    |                 |
| 2         | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal | Kab. Toba        | Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan   | 3 sekolah                             | 47,250,000            | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan | Kab. Toba        | Sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan   | 3 sekolah                             | 47,250,000           |                 |
|           | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa</b>  | <b>100%</b>                           | <b>183,750,000</b>    | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa</b>  | <b>100%</b>                           | <b>183,750,000</b>   |                 |
| 3         | Penyediaan Data dan Infomasi Keuarga   | Kab. Toba        | Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana  | 1 buku                                | 47,250,000            | Penyediaan Data dan Infomasi Keuarga  | Kab. Toba        | Data Pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga  | 1 buku                                | 47,250,000           |                 |
| 4         | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Kab. Toba        | Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB   |                                       | 84,000,000            | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Kab. Toba        | Laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB   |                                       | 84,000,000           |                 |
| 5         | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain  | Kab. Toba        | Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB  | 30 persen                             | 52,500,000            | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor Lain   | Kab. Toba        | Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB  | 30 persen                             | 52,500,000           |                 |
| <b>II</b> | <b>Program Keluarga Berencana</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)</b>   | <b>12.10%</b>                         | <b>2,335,000,000</b>  | <b>Program Keluarga Berencana</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)</b>   | <b>12.10%</b>                         | <b>2,335,000,000</b> |                 |
|           | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmeet need</b>                 | <b>70 (16 Kec &amp; 170 Desa/Kel)</b> | <b>258,000,000</b>    | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmeet need</b>                 | <b>70 (16 Kec &amp; 170 Desa/Kel)</b> | <b>258,000,000</b>   |                 |
| 6         | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Pogram KKBPK  | Kab. Toba        | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana   | 16 kecamatan                          | 88,000,000            | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Pogram KKBPK   | Kab. Toba        | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana   | 16 kecamatan                          | 88,000,000           |                 |
| 7         | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  | Kab. Toba        | Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana   | 16 kecamatan                          | 120,000,000           | Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Kab. Toba        | Pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana   | 16 kecamatan                          | 120,000,000          |                 |
| 8         | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK   | Kab. Toba        | Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB                       | 0 balai                               | 50,000,000            | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK  | Kab. Toba        | Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB                       | 0 balai                               | 50,000,000           |                 |

| No. | Rancangan Awal RKPD  |           |  |                  |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |           |   |                  |                      | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|--|------------------|----------------------|--|-----------|---|------------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja  | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp)  | Program/Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Kebutuhan Dana (Rp)  |                 |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)  | (5)              | (6)                  | (7)  | (8)       | (9)   | (10)             | (11)                 | (12)            |
|     | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Kab. Toba | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b>      | <b>61,00%</b>    | <b>520,000,000</b>   | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Kab. Toba | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b> | <b>61,00%</b>    | <b>520,000,000</b>   |                 |
| 9   | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB   | Kab. Toba | Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluh KB oleh PKB/PLKB  | 1 jenis          | -                    | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB   | Kab. Toba | Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluh KB oleh PKB/PLKB   | 1 jenis          | -                    |                 |
| 10  | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Toba | Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO  | 65 persen        | 230,000,000          | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Toba | Persentase Penyuluh KB / PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO   | 65 persen        | 230,000,000          |                 |
| 11  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Kab. Toba | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan   | 100 persen       | 290,000,000          | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Kab. Toba | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /  | 100 persen       | 290,000,000          |                 |
|     | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kab. Toba | <b>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</b>  | <b>70,00%</b>    | <b>1,255,000,000</b> | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Kab. Toba | <b>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</b>   | <b>70,00%</b>    | <b>1,255,000,000</b> |                 |
| 12  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          | Kab. Toba | Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes   | 100 persen       | 82,500,000           | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan                                      | Kab. Toba | Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes  | 100 persen       | 82,500,000           |                 |
| 13  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 76 persen        | 455,000,000          | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 76 persen        | 455,000,000          |                 |
| 14  | Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB   | Kab. Toba | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB  | 0 jenis          | -                    | Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB   | Kab. Toba | Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB   | 0 jenis          | -                    |                 |
| 15  | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif  | 77.45 persen     | 82,500,000           | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB  | Kab. Toba | Persentase Peserta KB Aktif   | 77.45 persen     | 82,500,000           |                 |
| 16  | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di  | Kab. Toba | PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi  | 1000 orang       | 105,000,000          | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak  | Kab. Toba | PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi   | 1000 orang       | 105,000,000          |                 |
| 17  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan   | Kab. Toba | Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)  | 0 orang          | 200,000,000          | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan   | Kab. Toba | Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi   | 0 orang          | 200,000,000          |                 |
| 18  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Kab. Toba | Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus  | 4 gerak          | 330,000,000          | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak   | Kab. Toba | Pelayanan KB dan KR Bergerak / Bakti Sosial di wilayah dan sasaran  | 4 gerak          | 330,000,000          |                 |
|     | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat</b>  | Kab. Toba | <b>Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB</b>   | <b>5 MoU/PKS</b> | <b>302,000,000</b>   | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi</b>   | Kab. Toba | <b>Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB</b>  | <b>5 MoU/PKS</b> | <b>302,000,000</b>   |                 |
| 19  | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | Kab. Toba | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes) | 450 akseptor     | 137,000,000          | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | Kab. Toba | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK-KB-Kes, IBI-KB-            | 450 akseptor     | 137,000,000          |                 |
| 20  | Pembinaan Terpadu Kampung KB   | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB  | 55 persen        | 165,000,000          | Pembinaan Terpadu Kampung KB   | Kab. Toba | Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB   | 55 persen        | 165,000,000          |                 |

| No. | Rancangan Awal RKPD  |           |   |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan   |           |   |                |                     | Catatan Penting |
|-----|--|-----------|---|----------------|---------------------|--|-----------|---|----------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan   | Lokasi    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)   | (5)            | (6)                 | (7)  | (8)       | (9)   | (10)           | (11)                | (12)            |
| III | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  | Kab. Toba | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  | 29.10%         | 780,000,000         | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  | Kab. Toba | Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera  | 29.10%         | 780,000,000         |                 |
|     | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Kab. Toba | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga   | 15,00 persen   | 615,000,000         | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan   | Kab. Toba | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga   | 15,00 persen   | 615,000,000         |                 |
| 21  | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Kab. Toba | Sarana dan Prasnana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan   | 5 jenis        | 65,000,000          | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi  | Kab. Toba | Sarana dan Prasnana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan   | 5 jenis        | 65,000,000          |                 |
| 22  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)  | Kab. Toba | Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilatih dan diorientasi | 384 kader      | 220,000,000         | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                    | Kab. Toba | Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilatih dan diorientasi | 384 kader      | 220,000,000         |                 |
| 23  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | Kab. Toba | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi                              | 640 orang      | 165,000,000         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi   | Kab. Toba | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi                              | 640 orang      | 165,000,000         |                 |
| 24  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Kab. Toba | Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan  | 105 kelompok   | 165,000,000         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan  | Kab. Toba | Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan  | 105 kelompok   | 165,000,000         |                 |
|     | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat  | Kab. Toba | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri   | 20,00 persen   | 165,000,000         | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi   | Kab. Toba | Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri   | 20,00 persen   | 165,000,000         |                 |
| 25  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Toba | kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga  | 18 kelompok    | 165,000,000         | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | Kab. Toba | kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga  | 18 kelompok    | 165,000,000         |                 |
| IV  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Toba | Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah  | 100%           | 3,621,410,910       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Toba | Cakupan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah  | 100%           | 3,621,410,910       |                 |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Toba | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah   | 8%             | 45,675,000          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Toba | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah   | 8%             | 45,675,000          |                 |
| 26  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | DPPKB     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 7 dokumen      | 31,500,000          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | DPPKB     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 7 dokumen      | 31,500,000          |                 |
| 27  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | DPPKB     | Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja   | 10 laporan     | 14,175,000          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | DPPKB     | Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja   | 10 laporan     | 14,175,000          |                 |
|     | Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Kab. Toba | Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN  | 100%           | 2,404,500,000       | Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Kab. Toba | Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN  | 100%           | 2,404,500,000       |                 |
| 28  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | DPPKB     | Gaji dan Tunjangan PNS  | 25 orang       | 2,399,250,000       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | DPPKB     | Gaji dan Tunjangan PNS  | 25 orang       | 2,399,250,000       |                 |
| 29  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | DPPKB     | Laporan keuangan akhir tahun  | 10 laporan     | 5,250,000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | DPPKB     | Laporan keuangan akhir tahun  | 10 laporan     | 5,250,000           |                 |
|     | Adminstrasi Kepegawaian  | Kab. Toba | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi  | 88,37%         | 143,079,600         | Adminstrasi Kepegawaian  | Kab. Toba | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi  | 88,37%         | 143,079,600         |                 |

| No.                | Rancangan Awal RKPD  |                  |  |                 |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |                  |  |                 |                     | Catatan Penting      |
|--------------------|--|------------------|--|-----------------|----------------------|--|------------------|--|-----------------|---------------------|----------------------|
|                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp)  | Program/Kegiatan   | Lokasi           | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Kebutuhan Dana (Rp) |                      |
| (1)                | (2)  | (3)              | (4)  | (5)             | (6)                  | (7)  | (8)              | (9)  | (10)            | (11)                | (12)                 |
| 30                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | DPPKB            | Pengadaan pakaian dinas                                      | 0 unit          | 23,079,600           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | DPPKB            | Pengadaan pakaian dinas                                      | 0 unit          | 23,079,600          |                      |
| 31                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | DPPKB            | pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan        | 0 orang         | 120,000,000          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | DPPKB            | pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan        | 0 orang         | 120,000,000         |                      |
|                    | <b>Adminstrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi pelayanan administrasi kantor</b>               | <b>22 jenis</b> | <b>326,191,455</b>   | <b>Adminstrasi umum perangkat daerah</b>   | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi pelayanan administrasi kantor</b>               | <b>22 jenis</b> | <b>326,191,455</b>  |                      |
| 32                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 20 jenis        | 3,129,000            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Bangunan             | 20 jenis        | 3,129,000           |                      |
| 33                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                 | 60 jenis        | 83,475,000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                 | 60 jenis        | 83,475,000          |                      |
| 34                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | DPPKB            | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih               | 10 jenis        | 21,335,160           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | DPPKB            | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih               | 10 jenis        | 21,335,160          |                      |
| 35                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Bulanan      | 540 kotak       | 28,350,000           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | DPPKB            | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat                         | 540 kotak       | 28,350,000          |                      |
| 36                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | DPPKB            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | 10 jenis        | 7,702,307            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | DPPKB            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | 10 jenis        | 7,702,307           |                      |
| 37                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | DPPKB            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan                | 3 jenis         | 5,250,000            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | DPPKB            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan                | 3 jenis         | 5,250,000           |                      |
| 38                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | DPPKB            | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 120 orang       | 176,949,988          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | DPPKB            | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 120 orang       | 176,949,988         |                      |
|                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>                    | <b>12 bulan</b> | <b>350,000,000</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>                    | <b>12 bulan</b> | <b>350,000,000</b>  |                      |
| 39                 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | DPPKB            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan                 | 0 unit          | 300,000,000          | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | DPPKB            | Pengadaan Kendaraan Dinas Operaonal/Lapangan                 | 0 unit          | 300,000,000         |                      |
| 40                 | Pengadaan Mebel  | DPPKB            | Pengadaan Mebel  | 0 jenis         | 50,000,000           | Pengadaan Mebel  | DPPKB            | Pengadaan Mebel  | 0 jenis         | 50,000,000          |                      |
| 41                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | DPPKB            | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                        | 0 unit          | -                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | DPPKB            | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                        | 0 unit          | -                   |                      |
| 42                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | DPPKB            | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 0 jenis         | -                    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan   | DPPKB            | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 0 jenis         | -                   |                      |
|                    | <b>Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</b>                   | <b>12 bulan</b> | <b>175,011,855</b>   | <b>Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</b>                   | <b>12 bulan</b> | <b>175,011,855</b>  |                      |
| 43                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | DPPKB            | Pembayaran rekening listrik dan internet                     | 2 jenis         | 23,011,855           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | DPPKB            | Pembayaran rekening listrik dan internet                     | 2 jenis         | 23,011,855          |                      |
| 44                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | DPPKB            | Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD            | 17 orang        | 152,000,000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | DPPKB            | Tenaga Kontrak/Honoror dan Pengelola Keuangan OPD            | 17 orang        | 152,000,000         |                      |
|                    | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                       | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>           | <b>100%</b>     | <b>176,953,000</b>   | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>  | <b>Kab. Toba</b> | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>           | <b>100%</b>     | <b>176,953,000</b>  |                      |
| 45                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPPKB            | Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun      | 50 unit         | 161,280,000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPPKB            | Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara per tahun      | 50 unit         | 161,280,000         |                      |
| 46                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | DPPKB            | Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara                | 10 jenis        | 15,673,000           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | DPPKB            | Peralatan dan Mesin- Mesin Kantor terpelihara                | 10 jenis        | 15,673,000          |                      |
| <b>J U M L A H</b> |  |                  |  |                 | <b>6,786,023,410</b> | <b>J U M L A H</b>   |                  |  |                 |                     | <b>6,967,410,910</b> |

| No. | Rancangan Awal RKPD           |        |                   |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan |        |                   |                |                     | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan         | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| (1) | (2)                           | (3)    | (4)               | (5)            | (6)                 | (7)                      | (8)    | (9)               | (10)           | (11)                | (12)            |

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2026. Selain usulan program berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 yang telah disusun tersebut ada juga usulan yang bersumber dari masyarakat melalui kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Toba ke Kecamatan maupun melalui Usulan Musrenbang.

Namun program dan kegiatan serta anggaran yang telah disusun ini seluruhnya bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Forum Reses Anggota DPRD Kabupaten Toba yang dilakukan ke kecamatan dan Usulan melalui Musrenbang Desa / Kecamatan / Kabupaten tidak ada seperti terlihat pada tabel T-C.32 sebagai berikut :

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Toba**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|-----------|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1)       | (2)              | (3)    | (4)               | (5)            | (6)     |
|           |                  |        |                   |                |         |
| N I H I L |                  |        |                   |                |         |
|           |                  |        |                   |                |         |
|           |                  |        |                   |                |         |
|           |                  |        |                   |                |         |
|           |                  |        |                   |                |         |



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 bukan harus berpedoman kepada Renstra, Hasil Musrenbang dan Reses tetapi perlu memperhatikan kebijakan Nasional dan Propinsi. Karena melalui Kebijakan Nasional akan diketahui arah pembangunan yang sebenarnya yaitu dengan menelaah terhadap kebijakan Nasional maka dengan demikian akan dapat disimpulkan tujuan pembangunan yang sesungguhnya.

Yang menjadi Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif,
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup,
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global,
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi,
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Yang menjadi Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya TFR dapat mencapai 3,58 pada Tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 3,55 pada tahun 2026,

2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 18,95 % pada Tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 19,10 % pada tahun 2026,
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 12,00 % pada Tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 11,70 % pada tahun 2026,
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 1/1000 kelahiran pada Tahun 2024 dan ditargetkan menjadi 1/1000 kelahiran pada tahun 2026,

**Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi,** yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah,
  - Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk,
  - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk,
  - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
2. **Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat),** yang dapat terwujud melalui strategi:
- Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KB-PP),
  - Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan,

- Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting),
- Peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten dan kota,
- Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan 4 (empat) terlalu kepada keluarga, PUS dan remaja,
- Peningkatan kemandirian Pasangan Usia Subur dalam ber-KB.

3. **Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga**, yang diwujudkan melalui strategi:

- Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK),
- Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja,
- Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah,
- Pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,
- Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia.

4. **Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah**, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - Peningkatan advokasi Program KKBPK berbasis biaya dan manfaat serta pendekatan sosial kultural,
  - Peningkatan promosi Program KKBPK (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah,
  - Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPK dan penyebarluasan materi/informasi terkini.
  
5. **Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi**, dengan strategi:
  - Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah,
  - Pengembangan *smart technology* untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPK.

Untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah menetapkan 4 (empat) program pokok adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk;**

- Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK serta menyediakan basis data kependudukan, data keluarga, data pembangunan keluarga dan data individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);**

- meningkatkan kualitas pelayanan KB dan menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara terjangkau Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) tersebut pelaksanaannya didanai oleh

APBD Kabupaten Toba Samosir dan anggaran dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;

- Pelayanan KB bagi keluarga miskin dilaksanakan di puskesmas-puskesmas secara terpusat setiap 1 (satu) bulan sekali di setiap Kecamatan. Pelayanan KB juga dilaksanakan pada momentum khusus seperti Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia, TNI KB Terpadu, Hari Jadi Kabupaten Toba Samosir serta Kesatuan Gerak PKK KB Kes. Pelayanan Medis Operasi Pria dan Wanita telah dilakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;
- meningkatkan kualitas dan keikutsertaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) meliputi PPKBD/Sub PPKBD dalam program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);**

- bertujuan meningkatkan usia perkawinan remaja, menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun/age specific fertility rate (ASFR) yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan di Pelatihan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja bagi remaja sekolah dan masyarakat sebanyak 240 orang, lomba Kelompok PIK remaja yang diikuti oleh 16 kelompok PIK Remaja yang ada di Masyarakat, pemilihan duta remaja dan duta mahasiswa tingkat Kabupaten Toba yang diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan remaja;
- mencegah / menurunkan stunting bagi para calon pengantin melalui penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin dan para ibu usia muda.
- meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program Bangga Kencana dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.

**d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang menjadi Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba “TERWUJUDNYA TOBA UNGGUL DAN BERSINAR” dengan Visi sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang Bagus dan Merata;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal;
3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera;
4. Kesehata yag Prima dan Terjangkau;
5. Pariwisata Berkat dan Meriah;
6. Membangun Iman yang terpelihara;
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk.

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan hasil review atas usulan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024, ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba pada Tahun 2024 akan melaksanakan 4 Program, 15 kegiatan dan 46 sub kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
  - 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
    - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.

- b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal.
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
    - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
    - c. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
    - a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
    - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
    - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
  - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
    - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
    - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
    - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
  - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
    - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
    - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
    - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
    - d. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
    - e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    - f. Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak
  - 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB

- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
  - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - a. Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
    - b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
    - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
    - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  - 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Adminstrasi Kepegawaian
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 4) Adminstrasi umum perangkat daerah
  - a. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - d. Penyediaan bahan logistik kantor
  - e. Barang cetakan dan penggandan
  - f. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Mebel
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada seluruh desa / kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Toba terutama pada desa / kelurahan atau kecamatan yang memiliki faskes.

Besaran biaya dan pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 6.967.410.909,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) dengan rincian terdapat tabel T-C.33 terlampir.

- a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Rumusan program dan kegiatan seperti tersebut dalam tabel T-C.33 adalah rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Rumusan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. Hal ini dilakukan agar rumusannya sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Tabel Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 ini dapat dilihat pada format Tabel T-C.33 sebagai berikut :

**TABEL T.C. 33  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN TOBA**

Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | RENCANA TAHUN 2024     |                     |  |                                      | CATATAN PENTING                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     |                  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|
|    |                   |   |   |                                  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 8                      | 9                   | 10   | 11                                   | 14   | 15                                | 16                  |                  |
|    |                   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                    |   |                                  |                        | 5,659,489,720.00    |  |                                      |  |                                   |                     | 5,952,520,625.00 |
| 2  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |   |                                  |                        | 5,659,489,720.00    |  |                                      |  |                                   |                     | 5,952,520,625.00 |
|    | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |   |                                  |                        | 5,659,489,720.00    |  |                                      |  |                                   |                     | 5,952,520,625.00 |
| 1. | 2.14.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | <i>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</i>   | 100 Persen                       | 100 Persen             | 3,711,427,220.00    |  |                                      |  | 100 Persen                        | 3,818,000,000.00    |                  |
|    | 2.14.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | <i>Persentase Capaian Kinerja Daerah</i>  | 95,00 persen                     | 89,00 persen           | 40,000,000.00       |  |                                      | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  | 95,00 persen                      | 55,000,000.00       |                  |
|    | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |                                  |                        |                     |  |                                      |  |                                   |                     |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  |                                  | 6 Dokumen              | 30,000,000.00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  |                                   | 40,000,000.00       |                  |
|    | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |                                  |                        |                     |  |                                      |  |                                   |                     |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |                                  | 5 Laporan              | 10,000,000.00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  |                                   | 15,000,000.00       |                  |
|    | 2.14.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | <i>Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN</i>   | 100,00 orang/bulan               | 100,00 orang/bulan     | 2,548,446,080.00    |  |                                      | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN | 100,00 orang/bulan                | 2,606,000,000.00    |                  |
|    | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                                  |                        |                     |  |                                      |  |                                   |                     |                  |

|                   |  |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|-------------------|--|--|---|--------------|----------------|------------------|--|--------------------------------------|--|--------------|------------------|
|                   |  |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  |              | 30 Orang/bulan | 2,543,446,080.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN     |              | 2,600,000,000.00 |
| 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |              | 1 Laporan      | 5,000,000.00     | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN     |              | 6,000,000.00     |
| 2.14.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |  | <i>Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi</i>   | 97,47 persen | 93,02 persen   | 80,000,000.00    |  |                                      | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi | 97,47 persen | 90,000,000.00    |
| 2.14.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             |              | 6 Orang        | 80,000,000.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi |              | 90,000,000.00    |
| 2.14.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  | <i>Frekuensi pelayanan administrasi kantor</i>  | 12,00 Bulan  | 12,00 Bulan    | 352,981,140.00   |  |                                      | Frekuensi pelayanan administrasi kantor          | 12,00 Bulan  | 365,000,000.00   |
| 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>                                 |              | 1 Paket        | 3,000,000.00     | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor          |              | 4,000,000.00     |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>   |              | 1 Paket        | 80,000,000.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor          |              | 90,000,000.00    |
| 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>  |              | 1 Paket        | 9,981,140.00     | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor          |              | 10,000,000.00    |
| 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |
|                   |  |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>  |              | 1 Paket        | 8,000,000.00     | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor          |              | 8,000,000.00     |
| 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |   |              |                |                  |  |                                      |  |              |                  |

|                   |   |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|-------------------|---|--|---|---------------|------------|----------------|--|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
|                   |   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>           |               | 1 Dokumen  | 2,000,000.00   | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor     |               | 3,000,000.00   |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                    |               | 16 Laporan | 250,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi pelayanan administrasi kantor     |               | 250,000,000.00 |
| 2.14.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -  | -   | -             | -          | 140,000,000.00 |  |                                      | Terpeliharanya barang milik daerah          | -             | 140,000,000.00 |
| 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                                |               | 1 Unit     | 100,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Terpeliharanya barang milik daerah          |               | 100,000,000.00 |
| 2.14.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>   |               | 1 Unit     | 40,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Terpeliharanya barang milik daerah          |               | 40,000,000.00  |
| 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <i>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</i>         | 12,00 Bulan   | 12,00 Bulan   |            | 274,000,000.00 |  |                                      | Frekuensi penyediaan jasa penunjang         | 12,00 Bulan   | 275,000,000.00 |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |               | 1 Laporan  | 24,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi penyediaan jasa penunjang         |               | 25,000,000.00  |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   |               | 1 Laporan  | 250,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Frekuensi penyediaan jasa penunjang         |               | 250,000,000.00 |
| 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i> | 100,00 persen   | 100,00 persen |            | 276,000,000.00 |  |                                      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100,00 persen | 287,000,000.00 |
| 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |   |               |            |                |  |                                      |   |               |                |

|    |                   |   |  |  |                                       |                       |  |                                      |  |  |                       |
|----|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>  |  | 1 Unit                                | 100,000,000.00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                    |  | 100,000,000.00        |
|    | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |  |  |                                       |                       |  |                                      |  |  |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>  |  | 52 Unit                               | 160,000,000.00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                    |  | 170,000,000.00        |
|    | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                                       |                       |  |                                      |  |  |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  |  | 10 Unit                               | 16,000,000.00         | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                    |  | 17,000,000.00         |
| 2. | <b>2.14.02</b>    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.</b>   | <b>3,55 Rata-ra ta Anak per Wanita</b> | <b>3,57 Rata-rata Anak per Wanita</b> | <b>203,962,500.00</b> |  |                                      |  | <b>3,55 Rata-ra ta Anak per Wanita</b> | <b>214,160,625.00</b> |
|    | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | <i>Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk</i>   | 29,00 persen                           | 27,00 persen                          | 49,612,500.00         |  |                                      | anak sekolah   | 29,00 persen                           | 52,093,125.00         |
|    | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |  |  |                                       |                       |  |                                      |  |  |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i> |  | 3 Satuan Pendidikan                   | 49,612,500.00         | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | anak sekolah   |  | 52,093,125.00         |
|    | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa</i>   | 0 persen                               | 100,00 persen                         | 154,350,000.00        |  |                                      | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa | 100,00 persen                          | 162,067,500.00        |
|    | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  |  |  |                                       |                       |  |                                      |  |  |                       |

|    |                   |   |   |                                     |                                    |                  |  |                                      |   |                                     |                  |
|----|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|    |                   |   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya   |                                     | 1 Dokumen                          | 82,687,500.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa                                |                                     | 86,821,875.00    |
|    | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |   |                                     |                                    |                  |  |                                      |   |                                     |                  |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   |                                     | 1 Dokumen                          | 22,050,000.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa                                |                                     | 23,152,500.00    |
|    | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |   |                                     |                                    |                  |  |                                      |   |                                     |                  |
|    |                   |   | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk |                                     | 32 Unit                            | 49,612,500.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa                                |                                     | 52,093,125.00    |
| 3. | 2.14.03           | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)</b>  | 11,7 Persen                         | 11,8 Persen                        | 1,384,100,000.00 |  |                                      |   | 11,7 Persen                         | 1,510,360,000.00 |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                 | Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need   | 100 (16 kec & 146/Desa/ Kel) persen | 80 (16 kec & 146/Desa/Kel ) persen | 193,250,000.00   |  |                                      | Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need | 100 (16 kec & 146/Desa/ Kel) persen | 212,575,000.00   |
|    | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana   |   |                                     |                                    |                  |  |                                      |   |                                     |                  |
|    |                   |   | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)   |                                     | 16 Unit                            | 50,000,000.00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need |                                     | 50,000,000.00    |
|    | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana   |   |                                     |                                    |                  |  |                                      |   |                                     |                  |

|  |                   |   |   |              |              |                |  |  |   |              |                |
|--|-------------------|---|---|--------------|--------------|----------------|--|--|---|--------------|----------------|
|  |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>                            |              | 16 Laporan   | 52,500,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                       | Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam Rangka penurunan unmet need   |              | 57,750,000.00  |
|  | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang  |   |              |              |                |  |  |   |              |                |
|  |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i> |              | 16 Dokumen   | 90,750,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam Rangka penurunan unmet need   |              | 99,825,000.00  |
|  | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | <i>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</i>   | 65,00 persen | 62,00 persen | 675,850,000.00 |  |  | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk | 65,00 persen | 712,785,000.00 |
|  | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB  |   |              |              |                |  |  |   |              |                |
|  |                   |   | <i>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</i>   |              | 2 Unit       | 150,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                       | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |              | 150,000,000.00 |
|  | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |   |              |              |                |  |  |   |              |                |
|  |                   |   | <i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>  |              | 100 Orang    | 284,350,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                       | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |              | 312,785,000.00 |
|  | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |   |              |              |                |  |  |   |              |                |

|                   |   |  |  |              |              |                |  |                                      |   |              |                |
|-------------------|---|--|--|--------------|--------------|----------------|--|--------------------------------------|---|--------------|----------------|
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i> |              | 75 Laporan   | 241,500,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |              | 250,000,000.00 |
| 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      |  | <i>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</i>  | 85,00 persen | 75,00 persen | 380,000,000.00 |  |                                      | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | 85,00 persen | 440,000,000.00 |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |  |              |              |                |  |                                      |   |              |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>  |              | 1 Laporan    | 60,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  |              | 70,000,000.00  |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |  |  |              |              |                |  |                                      |   |              |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>   |              | 150 Orang    | 100,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  |              | 110,000,000.00 |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |  |  |              |              |                |  |                                      |   |              |                |
|                   |   |  | <i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>   |              | 8 Unit       | 80,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  |              | 90,000,000.00  |
| 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB   |  |  |              |              |                |  |                                      |   |              |                |

|    |                   |   |  |             |              |                |  |                                      |  |             |                |
|----|-------------------|---|--|-------------|--------------|----------------|--|--------------------------------------|--|-------------|----------------|
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>   |             | 50 Orang     | 30,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |             | 40,000,000.00  |
|    | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  |  |             |              |                |  |                                      |  |             |                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>   |             | 3 Laporan    | 60,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |             | 70,000,000.00  |
|    | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan   |  |             |              |                |  |                                      |  |             |                |
|    |                   |   | <i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>   |             | 750 Orang    | 50,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |             | 60,000,000.00  |
|    | 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | <i>Mou/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di DPPKB</i>  | 10 kegiatan | 7 kegiatan   | 135,000,000.00 |  |                                      | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB  | 10 kegiatan | 145,000,000.00 |
|    | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                          |  |             |              |                |  |                                      |  |             |                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> |             | 3 Organisasi | 90,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB  |             | 100,000,000.00 |
|    | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB  |  |             |              |                |  |                                      |  |             |                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>   |             | 58 Laporan   | 45,000,000.00  | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB  |             | 45,000,000.00  |
| 4. | 2.14.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | <i>Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I</i>  | 28,9 Persen | 29 Persen    | 360,000,000.00 |  |                                      |  | 28,9 Persen | 410,000,000.00 |

|                   |  |  |              |              |                |               |  |                                      |   |              |                |
|-------------------|--|--|--------------|--------------|----------------|---------------|--|--------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  | 21,00 persen | 17,00 persen | 310,000,000.00 |               |  |                                      | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 21,00 persen | 350,000,000.00 |
| 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |  |              |              |                |               |  |                                      |   |              |                |
|                   |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                            |              |              | 1 Laporan      | 80,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |              | 90,000,000.00  |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))           |  |              |              |                |               |  |                                      |   |              |                |
|                   |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   |              |              | 1 Laporan      | 80,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |              | 90,000,000.00  |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                  |  |              |              |                |               |  |                                      |   |              |                |
|                   |  | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia   |              |              | 10 Unit        | 60,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |              | 70,000,000.00  |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))          |  |              |              |                |               |  |                                      |   |              |                |
|                   |  | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |              |              | 150 Orang      | 90,000,000.00 | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |              | 100,000,000.00 |

|                    |  |  |              |              |                         |  |                                      |   |              |                         |
|--------------------|--|--|--------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| 2.14.04.2.02       | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                         | <i>Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri</i>   | 68.00 persen | 63.00 persen | 50,000,000.00           |  |                                      | Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri | 68.00 persen | 60,000,000.00           |
| 2.14.04.2.02.0003  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  |              |              |                         |  |                                      |   |              |                         |
|                    |  | <i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i> |              | 6 Organisasi | 50,000,000.00           | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri |              | 60,000,000.00           |
| <b>J U M L A H</b> |  |  |              |              | <b>5,659,489,720.00</b> |  |                                      |   |              | <b>5,952,520,625.00</b> |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Rencana Pendanaan untuk Penurunan Stunting**

Begitu pentingnya penanganan masalah stunting ini, maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden ini, terdapat 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Penurunan Stunting, yaitu :

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan dikementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten / kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Dari ke 5 (lima) pilar tersebut, kita baru memasuki pilar pertama yaitu peningkatan komitmen kita bersama dalam mempercepat penurunan stunting.

Itulah yang menjadi dasar mengapa rapat koordinasi ini menjadi penting kita laksanakan, karena sejak dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toba tahun 2022, menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama mewujudkan komitmen terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Paser.

Merujuk Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, maka intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu:

- Aksi 1 : Analisis Situasi Program Penurunan Stunting, perangkat daerah penanggung jawab Bappedalitbang dan Perangkat Daerah
- Aksi 2 : Penyusunan Rencana Kegiatan, perangkat daerah penanggung jawab adalah Bappedalitbang dan Perangkat Daerah
- Aksi 3 : Rembuk Stunting, perangkat daerah penanggung jawab adalah Bappedalitbang dan.atau Sekretariat Daerah

- Aksi 4 : Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, perangkat daerah penanggung jawan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Aksi 6 : Sistem Manajemen Data Stunting, perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Dinas PPKBPPPA, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Data Stunting perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan
- Aksi 8 : Reviu Kinerja Tahunan, perangkat daerah penanggung jawab adalah Sekretariat Daerah dan Bappedalitbang.

Untuk memastikan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan Aksi Integrasi tersebut, diperlukan rapat-rapat koordinasi sebagai wahana untuk melaporkan kemajuan tindak lanjut sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat dalam setiap aksi tersebut.

berdasarkan pelaksanaan dari ke lima aksi tersebut perlu didukung adanya dana sehingga akan menghasilkan Lokus Fokus Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stuting Terintegrasi dan memetakan program dan kegiatan yang tersedia pada perangkat daerah untuk intervensi penurunan stunting.

#### **4.2 Rencana Pendanaan untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrim**

#### **4.3 Rencana Pendanaan untuk Pelaksanaan Inovasi**

#### **4.4 Rencana Pendanaan untuk Pencapaian SPM**

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige,

2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN TOBA



dr. JULIWAN HUTAPEA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197107012001121001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TOBA  
TAHUN 2024**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |   |   | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH   |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17   |  |
|    |                   | <b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                             |   |  |   |   |  | <b>5.659.489.720,00</b> |   |   |   |   |   |                     |                                      | <b>5.952.520.625,00</b>                                  |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR        |   |  |   |   |  | <b>5.659.489.720,00</b> |   |   |   |   |   |                     |                                      | <b>5.952.520.625,00</b>                                  |  |
|    | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA      |   |  |   |   |  | <b>5.659.489.720,00</b> |   |   |   |   |   |                     |                                      | <b>5.952.520.625,00</b>                                  |  |
| 1. | 2.14.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | <i>Cakupan kinerja penunjang<br/>urusan pemerintah daerah</i> | 100 Persen                                   |   |   | 100 Persen                             | 3.711.427.220,00        |   |   |   |   |   | 100 Persen          | 3.818.000.000,00                     |  |  |
|    | 2.14.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | <i>Persentase Capaian Kinerja<br/>Daerah</i>                  | 95,00 perse<br>n                             |   |   | 89,00 persen                           | 40.000.000,00           |   |   | Meningkat<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola<br>Pemerintah<br>yang<br>berkualitas<br>dan Inovatif<br>1. Pengu<br>an Kualitas<br>Sumberday<br>a Manusia<br>dan Pening<br>katan Kesej<br>ahteraan<br>Sosial Mas<br>yarakat. | Persentase Capaian<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | 95,00 perse<br>n    | 55.000.000,00                        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |  |   |   |  |                         |   |   |   |   |   |                     |                                      |  |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>    |  |   |   | 6 Dokumen                              | 30.000.000,00           | Kab. Toba,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkat<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Tata<br>Kelola<br>Pemerintah<br>yang<br>berkualitas<br>dan Inovatif<br>1. Pengu<br>an Kualitas<br>Sumberday<br>a Manusia<br>dan Pening<br>katan Kesej<br>ahteraan<br>Sosial Mas<br>yarakat. | Persentase Capaian<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah |                     | 40.000.000,00                        | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |  |
|    | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |  |   |   |  |                         |   |   |   |   |   |                     |                                      |  |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025         |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  | TARGET                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  |  |  |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |  |   |   | 5 Laporan                              | 10.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah  |                     | 15.000.000,00                        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN</i>   | 100,00 orang/bulan                           |   |   | 100,00 orang/bulan                     | 2.548.446.080,00    |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN | 100,00 orang/bulan  | 2.606.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |  |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  |  |   |   | 30 Orang/bulan                         | 2.543.446.080,00    | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN |                     | 2.600.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |  |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  |  |  |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN     |                     | 6.000.000,00                         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi</i>   | 97,47 persen                                 |   |   | 93,02 persen                           | 80.000.000,00       |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi | 97,47 persen        | 90.000.000,00                        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |  |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>                             |  |   |   | 6 Orang                                | 80.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi |                     | 90.000.000,00                        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.14.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>Frekuensi pelayanan administrasi kantor</i>  | 12,00 Bulan                      |  |   | 12,00 Bulan                            | 352.981.140,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi pelayanan administrasi kantor | 12,00 Bulan                       | 365.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 1 Paket                                | 3.000.000,00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                   | 4.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |                                  |  |   | 1 Paket                                | 80.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.   | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                   | 90.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>                                |                                  |  |   | 1 Paket                                | 9.981.140,00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.   | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                   | 10.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 1 Paket                                | 8.000.000,00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                      | 8.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 2.000.000,00        | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 16 Laporan                             | 250.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.   | Frekuensi pelayanan administrasi kantor |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -   | -  |   |   | -                                      | 140.000.000,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Terpeliharanya barang milik daerah      | -                                    | 140.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                              |  |   |   | 1 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Terpeliharanya barang milik daerah  |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |                                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 40.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Terpeliharanya barang milik daerah  |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>Frekuensi penyediaan jasa penunjang</i>  | 12,00 Bulan                                  |   |   | 12,00 Bulan                            | 274.000.000,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi penyediaan jasa penunjang | 12,00 Bulan                          | 275.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |                                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 24.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Frekuensi penyediaan jasa penunjang         |                                   | 25.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 250.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.   | Frekuensi penyediaan jasa penunjang         |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>  | 100,00 persen                    |  |   | 100,00 persen                          | 276.000.000,00      |  |                                      | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100,00 persen                     | 287.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pemeliharaan barang milik daerah |                                   | 100.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>        |                                  |  |   | 52 Unit                                | 160.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pemeliharaan barang milik daerah |                                   | 170.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  |                                  |  |   | 10 Unit                                | 16.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase pemeliharaan barang milik daerah |                                   | 17.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.02           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.</b>                                   | 3,55 Rata-rata Anak per Wanita   |  |   | 3,57 Rata-rata Anak per Wanita         | 203.962.500,00      |  |                                      |   |   |   | 3,55 Rata-rata Anak per Wanita    | 214.160.625,00      |  |
|    | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | <i>Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk</i> | 29,00 persen                     |  |   | 27,00 persen                           | 49.612.500,00       |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.     | anak sekolah                                | 29,00 persen                      | 52.093.125,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025                               |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  |   |   |                     |                                   | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i> |                                  |  |   | 3 Satuan Pendidikan                    | 49.612.500,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | anak sekolah  |                     | 52.093.125,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa</i>  | 0 persen                         |  |   | 100,00 persen                          | 154.350.000,00      |  |                                      | -   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa | 100,00 persen       | 162.067.500,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                 |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya</i>  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 82.687.500,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa |                     | 86.821.875,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD   | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                      |   |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025  |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|---|--|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                    |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                             | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  |
|    |                   |   |  |                                    |  |   |  |                         |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                    |                         |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                  | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                                 | 16                      | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>   |                                    |  |   | 1 Dokumen                              | 22.050.000,00           | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa                            |                                    | 23.152.500,00           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |  |                                    |  |   |  |                         |  |                                      |   |   |   |                                    |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i> |                                    |  |   | 32 Unit                                | 49.612.500,00           | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa                            |                                    | 52.093.125,00           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.03           | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)</b>   | <b>11,7 Persen</b>                 |  |   | <b>11,8 Persen</b>                     | <b>1.384.100.000,00</b> |  |                                      |   |   |   | <b>11,7 Persen</b>                 | <b>1.510.360.000,00</b> |  |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                 | <i>Persentase penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need</i>   | 100 (16 kec & 146/Desa/Kel) persen |  |   | 80 (16 kec & 146/Desa/Kel) persen      | 193.250.000,00          |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need | 100 (16 kec & 146/Desa/Kel) persen | 212.575.000,00          | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana   |  |                                    |  |   |  |                         |  |                                      |   |   |   |                                    |                         |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>  |  |   |   | 16 Unit                                | 50.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana                                  |   |  |   |   |  |                     |  |  |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>                            |  |   |   | 16 Laporan                             | 52.500.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                       | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need |                                      | 57.750.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang |   |  |   |   |  |                     |  |  |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i> |  |   |   | 16 Dokumen                             | 90.750.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana dalam Rangka penurunan unmet need |                                      | 99.825.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | 65,00 persen                     |  |   | 62,00 persen                           | 675.850.000,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk | 65,00 persen                      | 712.785.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |   |                                   |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia   |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 150.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |   |                                   |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                  |                                  |  |   | 100 Orang                              | 284.350.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |                                   | 312.785.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025   |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  |   |   |                     |                                   | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i> |                                  |  |   | 75 Laporan                             | 241.500.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk |                     | 250.000.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      | <i>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</i>  | 85,00 persen                     |  |   | 75,00 persen                           | 380.000.000,00      |  |                                      | -   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.     | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | 85,00 persen        | 440.000.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>  |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 60.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.     | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  |                     | 70.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i> |  |   |   | 150 Orang                              | 100.000.000,00      | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                            |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>   |  |   |   | 8 Unit                                 | 80.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                           |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>                     |  |   |   | 50 Orang                               | 30.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |  |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>             |  |   |   | 3 Laporan                              | 60.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |                                      | 70.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i> |  |   |   | 750 Orang                              | 50.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | <i>Mou/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di DPPKB</i>                      | 10 kegiatan                                  |   |   | 7 kegiatan                             | 135.000.000,00      |  |                                      | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB  | 10 kegiatan                          | 145.000.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |  |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                                      |   |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                       |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                    | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> |                                  |  |   | 3 Organisasi                           | 90.000.000,00         | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB   |                                   | 100.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB   |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |   |   |   |                                   |                       |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>   |                                  |  |   | 58 Laporan                             | 45.000.000,00         | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -   | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Mou/PKS yang ditindak unit kerja di DPPKB   |                                   | 45.000.000,00         | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | 2.14.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b><i>Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I</i></b>   | <b>28,9 Persen</b>               |  |   | <b>29 Persen</b>                       | <b>360.000.000,00</b> |  |                                      |   |   |   | <b>28,9 Persen</b>                | <b>410.000.000,00</b> |  |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | <i>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</i>   | 21,00 persen                     |  |   | 17,00 persen                           | 310.000.000,00        |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 21,00 persen                      | 350.000.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |   |   |   |                                   |                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 80.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>                         |  |   |   | 1 Laporan                              | 80.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |                                      | 90.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))         |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>                    |  |   |   | 10 Unit                                | 60.000.000,00       | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif<br>1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |                                      | 70.000.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |   |   |                                      |                     |  |

| NO                 | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|--------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
|                    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2024                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  |
|                    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                         |  |
| 1                  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                      | 17   |
|                    |                   |  | <i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i> |                                  |  |   | 150 Orang                              | 90.000.000,00           | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga |                                   | 100.000.000,00          | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                    | 2.14.04.2.02      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                         | <i>Pemetaan Kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri</i>  | 68.00 persen                     |  |   | 63.00 persen                           | 50.000.000,00           |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri   | 68.00 persen                      | 60.000.000,00           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                    | 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |   |                                  |  |   |  |                         |  |                                      |   |  |   |                                   |                         |  |
|                    |                   |  | <i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>      |                                  |  |   | 6 Organisasi                           | 50.000.000,00           | Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif 1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. | Persentase kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri   |                                   | 60.000.000,00           | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>J U M L A H</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>5.659.489.720,00</b> |  |                                      |   |  |   |                                   | <b>5.952.520.625,00</b> |  |